

ADMINISTRATIVE SCIENCE DISCUSSION FORUM (ASADF) FOCUS GROUP DISCUSSION

KEBIJAKAN KEWILAYAHAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (SPATIAL POLICY IN POVERTY ERADICATION)

Oleh

Prof. M. Mas'ud Said, PhD

KONSEPSI SPATIAL DEVELOPMENT POLICIES

- Secara simpel **pendekatan spatial** ialah pendekatan pembangunan dimana pemerintah atau perancang pembangunan lebih dulu menggambarkan keadaan sosial ekonomi berdasarkan pertimbangan geografis.
- Beda pendekatan ini misalnya dengan **pendekatan sektoral** ialah dimana pemerintah secara sentralistis menghitung agregat pertumbuhan ekonomi secara nasional, tanpa memerinci keadaan spesifik di tiap daerah tertentu.
- Kelebihan pendekatan ini ialah bahwa **tiap daerah memiliki ciri dan kondisi masing masing** sehingga PERENCANAAN DAN KEPUTUSAN PERENCANAAN ANGGARAN DAN PEMBANGUNAN TAK DIDASARKAN ANGKA AGREGAT, TAPI TITIS, HARUS PAS DENGAN PULAU DEMI PULAU, DAERAH DEMI DAERAH, KAMPUNG DEMI KAMPUNG, DESA DEMI DESA.

CONCEPTION OF SPATIAL POLICIES

"Regional/spatial planning gives geographical expression to the economic, social, cultural and ecological policies of society.

It is at the same time a scientific discipline, an administrative technique and a policy developed as an interdisciplinary and comprehensive approach directed towards a balanced regional development..”

THE ORIGIN OF INDONESIA AND THE GAP

■ **KEBERAGAMAN MENJADI PERTENTANGAN KULTUR, KEPERCAYAAN DAN AGAMA**



■ SALAH SATU CIRI NATURAL INDONESIA IALAH BAHWA KITA TERLAHIR SECARAA BERAGAM SECARA IDEOLOGIS YANG KEMUDIAN BERSATU DALAM PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 45

■ **KEBERAGAMAN MENJADI PERRTENTANGAN ETNIS, GEOGRAFIS DAN IDENTITAS**



■ SUDAH TIDAK DIRAGUKAN LAGI BAHWA INDONESIA DISEBUT SEBAGAI THE MOST DIVERSE NATION IN THE WORLD; ETNIS GEOGRAFIS DAN LOCAL IDENTITY,

■ **KEBERAGAMAN MENJADI KETIMPANGAN SOCIO ECONOMIC**



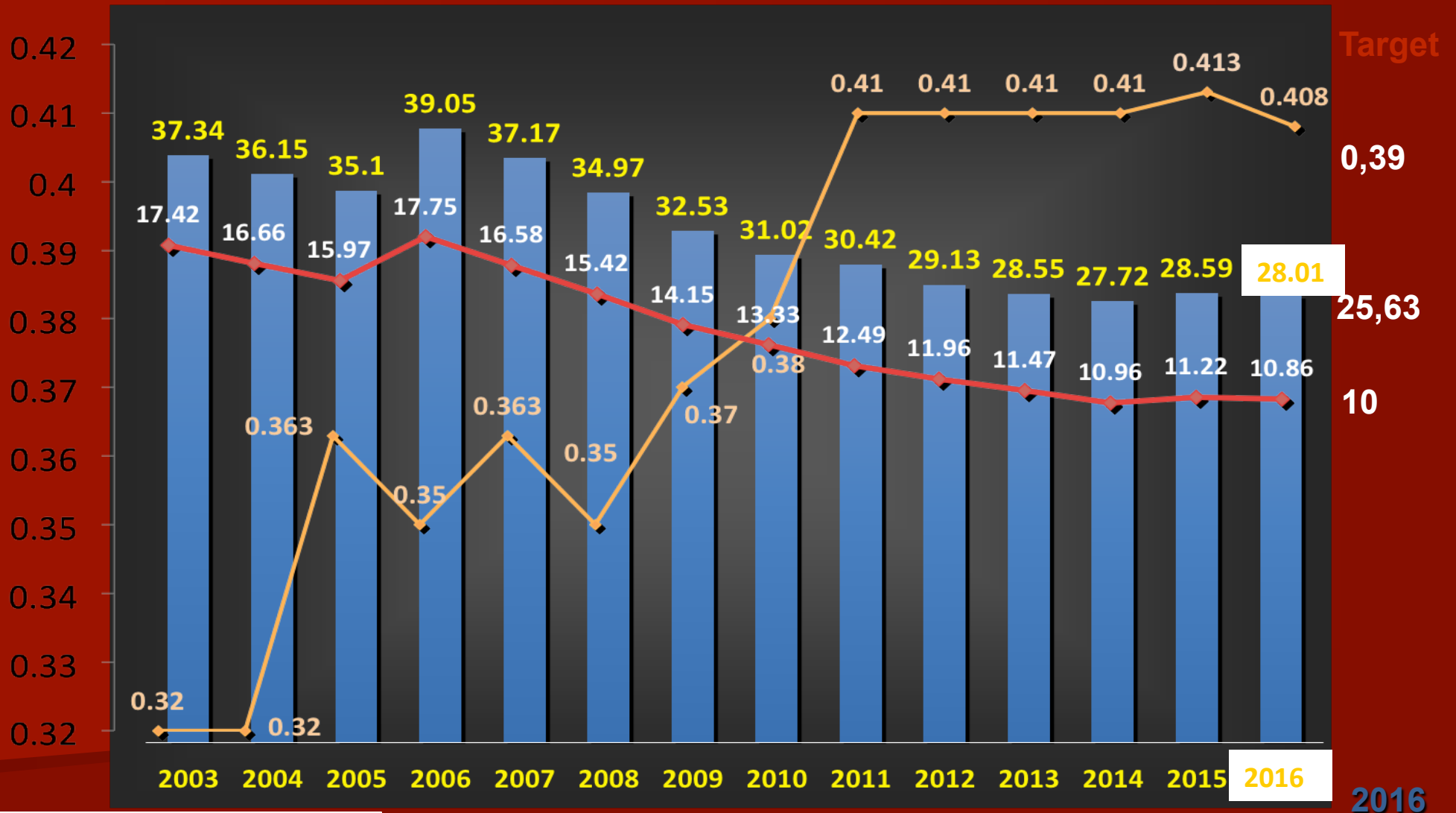
■ DISEBABKAN KONDISI ALAMIAH DAN IMPACT KEBIJAKAN SEKTORAL ,MAKA MENIMBULKAN KETIMPANGAN EKONOMI ORANG KAYA – ORANG MISKIN, KAWASAN TIMUR – KAWASAN BARAT ANTARA PEKERJA - PEMILIK MODAL, DESA -KOTA

■ JENDRAL ABDUL HARIS NASUTION



■ **SETIAP SENTI JURANG KETIMPANGAN EKONOMI DAN KETIDAK ADILAN AKAN MENGUNDANG KONFLIK DAN MUNGKIN PERANG DAN KEKACAUAN**

Kemiskinan dan Ketimpangan (Gini Ratio)



SUMBER DIRJEN PFM 2017

Kesenjangan Ekonomi (GINI Ratio) Populasi Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Presentase Penduduk Miskin (%)

NATURAL DIVERSITY VS MAN MADE INBALLANCE

- Dalam keadaan normal negara kita tidak hanya menghadapi dan mempertahankan kebhinnekaan, namun setiap hari dan setiap saat kita menghadapi apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai **social in justice** dan ketidakadilan sosial dan ekonomi disamping ethnicity dan economic gap.

- Sejumlah penelitian—Lambang Trijono, dkk. (2004a, 2004b), Riza Sihbudi, dkk. (2001), dan Syafuan Rozi, dkk. (2006)—menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu akar konflik dan kekerasan internal (massa *versus* massa dan massa *versus* negara) **adalah kondisi disparitas ekonomi. Karena Indonesia memiliki beragam etnis, ditambah dengan adanya disparitas ekonomi, maka terjadi gejala tegerusnya kebersamaan.**

LEMAHNYA PEMERATAAN, MELEMAHKAN HANKAM



- Kalau kita baca **The Fundamental of Guerilla Warfare** dan **Pertahanan Republik Indonesia** di Masa lalu dan Masa yang akan Datang dari Jendral Abd Haris Nasution,
- kita juga harus berani mencoba meletakkan masalah sosial, ketidakadilan sosial sebagai bagian dari ancaman ketahanan negara.
- “ Kalau saya ingin mengatakan bahwa perang militer itu hanyalah babak akhir dari runtuhnya **sendi sosial dan pelemahan keadilan ekonomi**” .

ANTI SPATIAL POLICIES

1. Ketimpangan ekonomi Ketidakadilan sosial,
2. Penguasaan sumber hidup oleh sekelompok orang,
3. Dominasi dan alih kuasa dari negara, ke non negara terhadap sumber strategis,
4. Pertentangan kapitalisasi vs nilai adat dan lokalitas,
5. Perebutan kekuasaan yang tak mengikuti aturan dan tensi politik di daerah yang tersulut provokasi
6. Kelompok yg “pekerjaanya” sering adu domba,
7. **NEGARA YG DIANGGAP TIDAK HADIR DALAM PROBLEM SOSIAL YANG AKUT**

ECONOMIC AND ACCESS IMBALLANCE

- Bahwa sebuah bangsa terwujud dan kuat apabila memiliki syarat apa yang pernah disebut oleh Soekarno—mengikuti pendapat Ernest Renan— sebagai *le desire d'être ensemble* atau kehendak akan bersatu.
- Soekarno mengingatkan syarat pendirian suatu bangsa yang didasarkan pada keinginan yang kuat dari setiap elemen masyarakat untuk bersatu (dalam Kebhinnekaan).
- Dalam konteks kemasyarakatan maka masalah sosial yang tak tertangani secara nasional akan menggumpal menjadi antipati kepada negara.

MENGUATNYA ETNOCENTRISME ?

Seorang pengamat Australia, Ian Chalmers mengatakan :

- “an associated rise in the regional sentiments and more strident assertions of the regional identity have threatened the very future of the unitary republic; some have predicted that the country will fragment as some of its component provinces seek independence.”
- (Chalmers, 2006, p. 31)



DATA KONFLIK DI DUNIA PASCA PERANG DINGIN SEBAGIAN TERBESAR KONFLIK INTERNAL

(CIRES FISIP UI 2007, HOLSTI, 1996,)

KASUS

- YUGOSLAVIA,
- BOSNIA,
- MACEDONIA,
- KROASIA,
- SUDAN,
- TURKI,
- MYANMAR,
- INDONESIA,

SIFAT KONFLIK

- KONFLIK INTERNAL
- SELF DETERMINATION
- ENTHO-CENTRISM
- 183 PERANG 1945-1995,
28 (15,3%) PERANG ANTAR NEGARA,
84,7% ADALAH PERANG INTERNAL

STRATEGI PENDEKATAN SOSIAL SPATIAL (SOCIAL SPATIAL APPROACHES) ALA KEMENSOS

GAMBARAN SEKILAS TUGAS KEMENSO

PENANGANAN FAKIR MISKIN; MISKIN DI PERDESAAN, DI PERKOTAAN, PENDUDUK MISKIN DI DAERAH TERPENCIL KEPULAUAN KECIL DAN PERBATASAN BERBASIS KELUARGA MISKIN.

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL; JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN, PERLINDUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN PENANGANAN KORBAN BENCANA SOSIAL DAN KONFLIK SOSIAL

PEMBEDAYAAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KELEMBAGAAN SOSIAL, KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL, PENGUMPULAN, PENGELOLAAN SUMBER DANA DAN BANTUAN SOSIAL

REHABILITASI SOSIAL; REHAB KORBAN NARKOBA, REHAB ANAK YANG BERMASALAH, LANSIA, PERLINDUNGAN ORANG CACAT, ORANG TERLANTAR, PEKERJA MIGRAM BERMASALAH

STRATEGI “SOCIAL APPROACH” KEMESOS

YANG DIMAKSUD DENGAN SOSIAL APPROACHES IALAH PENDEKATAN UNTUK MENGATASI MASALAH MASALAH SOSIAL DENGAN JALAN **JAMINAN SOSIAL DAN BANTUAN SOSIAL**, MEMBERI BANTUAN SECARA TERSTRUKTUR, SKEMATIS DAN TERBATAS KEPADA MEREKA YANG BERADA DALAM MASALAH SOSIAL.

PENDEKATAN KEMENSOS LEBIH BANYAK PADA TATARAN KESEJAHTERAAN **BERUPA KARTU KELUARGA SEJAHTERA**, PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH), PROGRAM SANTUNAN DAN REHAB PADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN TERMASUK PROGRAM KESERASIAN SOSIAL DALAM NAUNGAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL



Icah (8 tahun) tak lagi bisa sekolah karena harus menjaga adik dan membantu ibu berjualan di lokasi wisata Cicurug, Cigamea, Bogor.

SECARA PROGRAMATIS KEMENSOS MENANGANI

- 1 • JAMINAN SOSIAL KELUARGA MELALUI PKH
- 2 • BANTUAN SOSIAL MELALUI PROGRAM RASTRA
- 3 • REHAB KECACATAN DAN KETUNAAN SOSIAL
- 4 • ANAK ANAK, LANSIA, NAPZA, TKI BERMASALAH
- 5 • PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
- 6 • REHAB KORBAN TINDAK KEKERASAN
- 7 • KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL

CONTOH PROGRAM SOCIAL APPROACH

PKH

CONDITIONAL CASH TRANSFER
6 JUTA KELUARGA,
MOST FURNERABLE FAMILIES,
THE MOST EFFECTIVE,
10 JUTA KEL THN 2018,
FAMILY DEVELOPMENT SESSION
11 RIBU PENDAMPING

RASKIN (RASTRA)

BANTUAN 15 KG BERAS,
EQUAL 105 RIBU RUPIAH
SASAR 15,5 JUTA KPM
BERJALAN 18 TAHUN

PEMBERDAYAAN SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL
KESERASIAN SOSIAL
MULTIKULTURALISME

Posisi Umum PKH

- MENEMPATI POSISI STRATEGIS DALAM KONTEKS NASIONAL MAUPUN DI INTERNAL KEMENTRIAN, BAIK DARI SISI ANGGARAN, LUASAN PROGRAM, MAUPUN IMPACT DAN MANFAAT YANG DIHARAPKAN. SEJAK PROGRAM INI DIPERKENALKAN TAHUN 2007, TERJADI PENINGKATAN YANG SIGNIFIKAN YANG MENUNJUKKAN **BAHWA PROGRAM INI CUKUP MEMILIKI MASA DEPAN**. NAMUN TENTU BANYAK KEKURANGAN DAN PERBAIKAN DIM MASA DEPAN.

MENJADI SEMACAM **LEARNING CENTRE** BAGI NEGARA SEKALIGUS KUNCI KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM BESAR SKEMA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL. KEGAGALAN PROGRAM INI AKAN BERDAMPAK SANGAT SERIUS BAGI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN BAGI MASYARAKAT SANGAT MISKIN. **WALAU ADA SKEPTISME TERHADAP PROGRAM PKH TAPI KEMENSOS TERUS MENGUPGRADE** TUGAS DAN PERAN PENDAMPING PKH, OPERATOR PKH, UPPKH DAN JUGA DAYA UNGKIT PROGRAM INI UNTUK BISA MEWISUDA ORANG SANGAT MISKIN MENJADI TIDAK MISKIN.

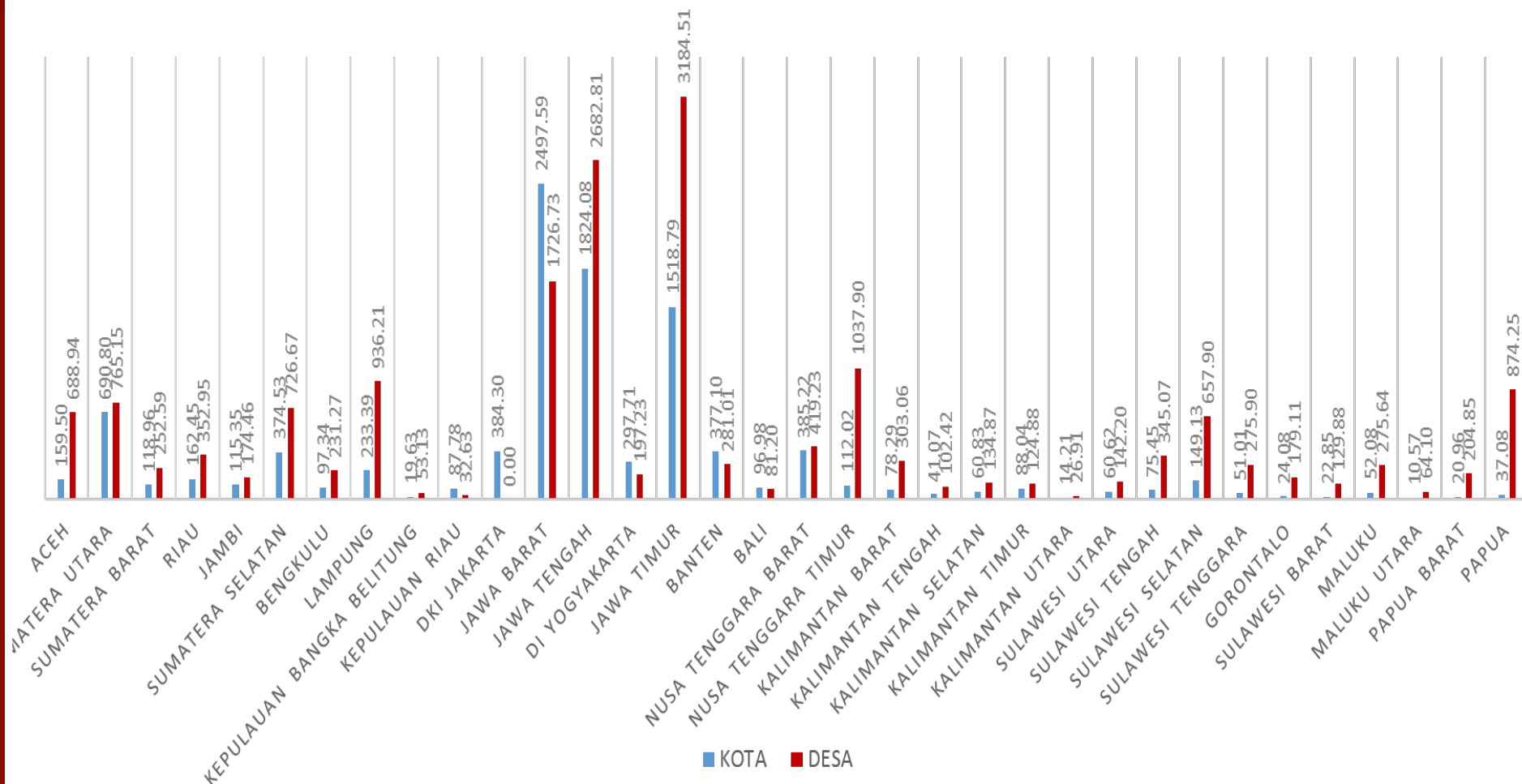
Sinergi dan komplementaritas program untuk Keluarga Miskin



**SASARAN 16,2 JUTA
2017 KELUARGA
MISKIN, DAN 10 JUTA
TAHUN 2018**

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA & DESA (BPS, MARET 2016)

(DALAM RIBUAN)



Rekapitulasi Bantuan Sosial Tunai dan Non Tunai Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

No	Jenis Bantuan	Penerima	Bantuan (Rp)
1	Program Keluarga Harapan Tunai	500.848 Keluarga	946.602.720.000
2	Program Keluarga Harapan Non Tunai	598.306 Jiwa	1.130.798.340.000
3	Beras Sejahtera (Rastra)	2.742.633 Jiwa	3.761.795.422.800
4	Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)	147.296 Keluarga	194.430.720.000
5	Bantuan Sosial Disabilitas	1.853 Jiwa	5.559.000.000
6	Bantuan Sosial Lanjut Usia	1.700 Jiwa	3.400.000.000
7	Bantuan Keserasian Sosial	14 Desa	1.526.000.000
8	Bantuan Sosial KUBE	6.923 Keluarga	13.846.000.000
9	Bantuan Sosial KUBE- Jasa	197 Kelompok	3.940.000.000
10	Bantuan Sosial RS-RTLH	90 Unit	1.350.000.000
11	Bantuan Sosial E-Warong	190 Kelompok	1.900.000.000
Jumlah			6.065.148.202.800

Rekapitulasi Bantuan Sosial Tunai dan Non Tunai Kota Batu Tahun 2017

No	Jenis Bantuan	Penerima	Bantuan (Rp)
1	Program Keluarga Harapan Non Tunai	1.705 Keluarga	3.222.450.000
2	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	5.649 Jiwa	7.456.680.000
3	Bantuan Sosial Disabilitas	3 Jiwa	9.000.000
4	Bantuan Sosial KUBE-Jasa	6 Kelompok	120.000.000
5	Bantuan Sosial E-Warong	5 Kelompok	50.000.000
6	Bantuan Hibah Dalam Negeri	370 Keluarga	78.000.000
Jumlah			10.936.130.000

Data PKH Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

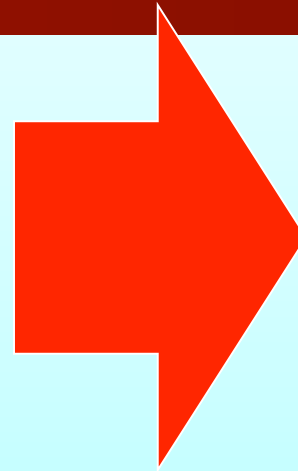
No	Kabupaten/Kota	Total KPM	Total Bantuan
1	Kab. Bangkalan	56,677	107,119,530,000
2	Kab. Banyuwangi	38,529	72,819,810,000
3	Kab. Blitar	27,268	51,536,520,000
4	Kab. Bojonegoro	47,153	89,119,170,000
5	Kab. Bondowoso	40,315	76,195,350,000
6	Kab. Gresik	31,657	59,831,730,000
7	Kab. Jember	68,076	128,663,640,000
8	Kab. Jombang	31,162	58,896,180,000
9	Kab. Kediri	44,748	84,573,720,000
10	Kota Batu	1,705	3,222,450,000
11	Kota Blitar	2,206	4,169,340,000
12	Kota Kediri	5,034	9,514,260,000
13	Kota Madiun	1,924	3,636,360,000
14	Kota Malang	6,438	12,167,820,000

Data PKH Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Total KPM	Total Bantuan
29	Kab. Pasuruan	43,911	82,991,790,000
30	Kab. Ponorogo	29,515	55,783,350,000
31	Kab. Probolinggo	51,078	96,537,420,000
32	Kab. Sampang	54,834	103,636,260,000
33	Kab. Sidoarjo	23,490	44,396,100,000
34	Kab. Situbondo	23,949	45,263,610,000
35	Kab. Sumenep	43,906	82,982,340,000
36	Kab. Trenggalek	17,911	33,851,790,000
37	Kab. Tuban	42,091	79,551,990,000
38	Kab. Tulungagung	22,891	43,263,990,000
Jumlah		1,099,154	2,077,401,060,000

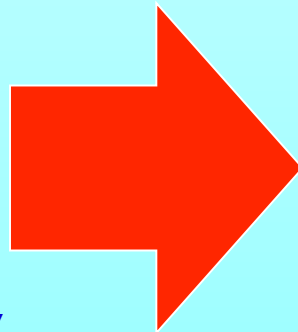
SCENARIO PENGUATAN KERJASAMA DALAM KESERASIAN SOSIAL

PENGUATAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT
KOMUNIKASI EFEKTIF DENGAN TOKOH MASY
PENGUATAN PROGRAM KEMENTRIAN
PENGUATAN PROGRAM DAERAH



PETA KONFLIK SOSIAL

PSKBS KEMSOS
TNI
KEPOLISIA
DINAS SOSIAL,
MITRA PEMERINTAH,



KERJASAMA KEMENSOS
DG PEMDA
MENDUKUNG
PENINGKATAN
HARMONI SOSIAL

PROGRAM PUSAT
DAERAH
KESERASIAN SOSIAL,
UNTUK BANGKITNYA
KEINGINAN
BERSATU

CATATAN PERJALANAN DI DESA DESA DI PROPINSI NTT DAN KALTIM



KISAH NELAYAN YANG HAMPIR HILANG HARAPAN DAN PENDUDUK YANG TINGGAL DALAM KEMANDIRIAN DAN KESENDIRIAN



26 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

1. Anak Balita Terlantar

2. Anak Terlantar

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

4. Anak Jalanan

5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus

8. Lanjut Usia Terlantar

9. Penyandang Disabilitas

10. Tuna Susila

11. Gelandangan

12. Pengemis

13. Pemulung

14. Kelompok Minoritas

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

18. Korban Trafficking

19. Korban Tindak Kekerasan

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

21. Korban Bencana Alam

22. Korban Bencana Sosial

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

24. Fakir Miskin

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

26. Komunitas Adat Terpencil

UU NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

MANDAT

**PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**



PMKS

Tujuh kelompok prioritas

1. Kemiskinan
2. Ketelantaran
3. Kecacatan
4. Keterpencilan
5. Ketunaan sosial dan Penyimpangan perilaku
6. Korban bencana; dan/atau
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

**SISTEM
PENYELENGGARAAN
KESSOS**



PSKS

Kebijakan :

- Penguatan infrastruktur kelembagaan sosial;
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- Penguatan jejaring kerja;
- Perluasan jangkauan pelayanan.

In line

In line

1. Jaminan Sosial
2. Perlindungan Sosial
3. Rehabilitasi Sosial
4. Pemberdayaan Sosial

SYARAT MEMAHAMI DAN MENYELESIKAN MASALAH SOSIAL HARUS PAHAM:

STRUKTUR SOSIAL

==>

SOCIAL STRUCTURE

PRANATA SOSIAL

==>

SOCIAL INSTITUTIONS

PERILAKU MASYARAKAT

==>

COMMUNITY BEHAVIOUR

PROSES INTERAKSI

==>

INTERACTION PROCES

IDEOLOGI MASYARAKAT

==>

LOCAL VALUES AND BELIEVES

MENGGAGAS STRATEGI DAN SOLUSI

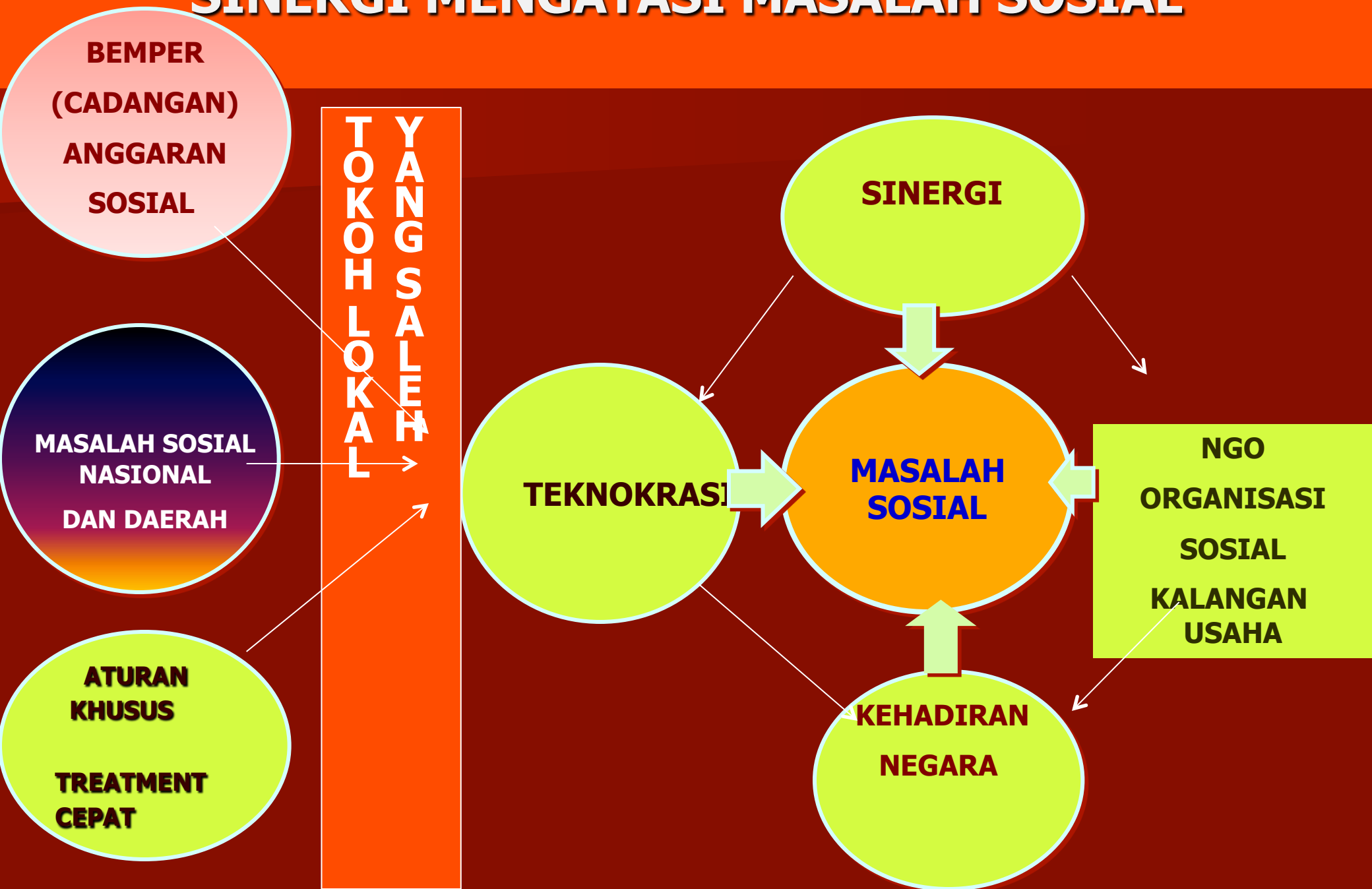
- DENGAN TEKNOKRATIS, PROGRAM DAN PENGANGGARAN SECARA SPATIAL
 - SINERGI ANTAR TOKOH DAN LEMBAGA SOSIAL
 - MENGUATKAN NILAI KESETIKAWANAN SOSIAL NASIONAL
 - BLUSUKAN KE BEBERPA DAERAH TERPENCIL, PEDALAMAN DAN
 - MEMBAGI KARTU SAKTI

KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN KEARIFAN SOSIAL SEBAGAI JAWABAN

Dalam bahasa agama, mungkin kesetiakawanan sosial ini dekat dengan istilah **ukhuwah ijtimaa'iyah** atau **al taakaaful al ijtimaa'iyah**. Nilai ini menjadi nilai dasar pendidikan pesantren salaf. Dalam istilah pemerintahan modern sikap itu kemudian dipromosikan sebagai **social responsibility** yang akhir akhir ini dipercaya sebagai obat mujarab bagi mengatasi masalah ketidak berdayaan sosial.

Di Nusantara, kesetiakawanan sosial itu sangat terbina sebagai kearifan sosial (local wisdom) yang dicontohkan dan dipertahankan secara komunal oleh pemimpin informal di kawasan desa dan beberapa suku di beberapa pulau kecil dan perbatasan. Secara agregat desa, kawasan terpencil dan kawasan tradisi itu oleh lebih dari 60% penduduk Indonesia.

SINERGI MENGATASI MASALAH SOSIAL



Kementrian Sosial Hadir Dalam Mengatasi Masalah Sosial

“ Negara harus **hadir** di tengah-tengah **masyarakat** untuk menyelesaikan masalah **kesejahteraan** sosial ”

-Khofifah Indar Parawansa-
Menteri Sosial Republik Indonesia





- **TERIMA KASIH BANYAK....**
- **THANK YOU VERY MUCH....**